

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Literasi keuangan (*financial literacy*) telah menjadi perhatian khusus di berbagai negara dalam beberapa tahun belakangan ini, hal ini dikarenakan setiap negara berkeinginan untuk membentuk cara berpikir penduduknya agar memiliki pola pikir keuangan yang baik dan berkualitas dalam mengelola keuangan. Dengan demikian, diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap roda perekonomian negara itu sendiri.

Di Indonesia literasi keuangan telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan. Terdapat kekhawatiran bahwa masyarakat cenderung kurang memahami konsep keuangan dan tidak memiliki pengetahuan untuk mengelola dan membuat keputusan keuangan dimasa yang akan datang. Dengan adanya perhatian khusus terhadap literasi keuangan ini diharapkan masyarakat lebih berpengetahuan, berkemampuan dan memiliki keterampilan dalam mengelola dan membuat keputusan keuangan dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi pada kestabilan sistem keuangan dan dapat mengurangi kerentanan pada sistem keuangan di Indonesia.

Literasi keuangan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe (1998). Literasi keuangan berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perencanaan keuangan adalah cara menjalani kehidupan saat ini sesuai dengan kemampuan keuangan (secara sederhana) dan merancang kehidupan masa depan yang lebih sejahtera. Lemahnya tingkat literasi keuangan seseorang dan kurangnya pengetahuan akan pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada penggunaan layanan jasa keuangan, hal ini disebabkan karena adanya hambatan akses ke lembaga keuangan, sehingga ini akan mempermudah seseorang untuk dipengaruhi oleh penjual produk keuangan lain yang tidak termasuk dalam lembaga keuangan resmi. Hal tersebut tentunya dapat menghambat proses pembangunan perekonomian negara.

Menurut Wibowo (2014) salah satu penyebab kurangnya kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dikarenakan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan survei nasional literasi keuangan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia yang tergolong *well literate* yaitu hanya sebesar 21,8%, *sufficient literate* sebesar 75,69%, *less literate* sebesar 2,06% dan *not literate* sebesar 0,14%, dengan tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan (*inklusi*) sebesar 59,7%.

TABEL 1.1

Tingkat Literasi Keuangan Penduduk Indonesia, 2013

NO	INDEKS LITERASI KEUANGAN	%
1	Well Literate	21,84
2	Sufficent Literate	75,69
3	Less Literate	2,0
4	Not Literate	0,41
		100

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2013

Sedangkan menurut laporan Bank Indonesia pada bulan Juli 2014 (www.bi.go.id) menyebutkan bahwa 49% dari masyarakat Indonesia sudah memiliki akses yang cukup baik terhadap lembaga keuangan, artinya hanya sebagian penduduk Indonesia yang memiliki pengetahuan keuangan yang baik terutama dalam sektor perbankan. Namun hasil ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Seperti Malaysia misalnya, 65% dari total penduduknya, Singapura 98% dan Thailand 73%, India 55%, China 65%, Filipina 75%, dan Pakistan 85%. Selain itu hampir 100% penduduk dari Malaysia dan Thailand memiliki akun di bank, sementara Indonesia hanya memiliki 41%, (Muat,dkk., 2014).

Berdasarkan angka indeks tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia dalam hal literasi keuangan masih rendah, dan kurang dari separuh penduduk Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan. Dalam hal ini pemerintah perlu berupaya untuk memupuk dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat mulai dari usia dini hingga dewasa, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan melalui pendidikan keuangan (*financial Education*).

Pendidikan keuangan adalah proses pembelajaran atau pembekalan yang dilakukan yang bertujuan untuk memacu individu agar lebih mengerti dalam pengelolaan keuangan dan memiliki perencanaan keuangan dimasa depan dengan baik sehingga berdampak pada kesejahteraan (Nababan dan Sadalia, 2011).

Pendidikan keuangan di Indonesia masih menjadi hal serius yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti, meskipun dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membentuk program Strategi Nasional Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai upaya dalam peningkatan literasi keungan bagi anak sejak usia dini. Akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik dan masih perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah. Adapun negara-negara yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberikan pendidikan literasi keuangan kepada masyarakatnya terutama kepada para pelajar dan mahasiswa dengan harapan generasi muda di negara tersebut memiliki literasi keuangan yang lebih baik dan meningkat yaitu Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan Australia (Nababan dan Sadalia, 2011).

Pemahaman akan literasi keuangan sangat diperlukan bagi setiap individu agar dapat mengelola dan merencanakan keuangannya. Begitu pula bagi para pelaku usaha khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan sebagai penopang perekonomian negara yang tidak bisa di kesampingkan begitu saja, hal ini dikarenakan UMKM memiliki daya tahan yang cukup tinggi. Hal ini terbukti pada saat terjadi krisis ekonomi pada

tahun 1998 hingga krisis keuangan global pada tahun 2007-2008, UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dengan tetap *survive* dalam menghadapi guncangan perekonomian dunia. Perkembangan data UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Data Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia
Tahun 2012-2013

No	Indikator	Tahun 2012	Tahun 2013	Perkembangan Tahun 2012-2013	(%)
1	Unit Usaha	56.543.592	57.895.721	1.361.129	2.41
	Usaha Mikro kecil & Menengah	56.534.592	57.895.721	1.361.129	2.41
	- Usaha Mikro	55.856.176	57.189.393	1.133.217	2.39
	- Usaha Kecil	629.418	654.222	24.803	3.94
	- Usaha Menengah	48.997	5.066	3.110	6.35
2	Tenaga Kerja	107.657.509	114.144.082	6.873.090	6.03
	Usaha Mikro Kecil & Menengah	107.657.509	114.144.082	6.873.090	6.03
	- Usaha Mikro	99.859.517	104.624.466	4.764.949	4.77
	- Usaha Kecil	4.535.970	5.570.231	1.034.262	22.8
	-Usaha Menengah	3.262.023	3.949.385	687.363	21.8

Sumber : Departemen Koperasi, 2013

Berdasarkan data Departemen Koperasi (Depkop) tahun 2012-2013 menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 56.534.592 unit dengan total penyerpan tenaga kerja sebesar 107.567.509 orang. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia sebesar 57.589.721 unit dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 114.144.082 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah UMKM dari tahun 2012-2013 sebesar 2,41% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,03%.

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah pelaku ekonomi mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan jumlah UMKM yang signifikan ini tidak didukung dengan kualitas pendidikan dan pengetahuan para pelaku usahanya dalam pengelolaan dan perencanaan keuangan (literasi keuangan), sehingga masih banyak UMKM yang kurang produktif hal ini dikarenakan rendahnya pengetahuan akan pengelolaan dan perencanaan keuangan (literasi keuangan) yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Para pelaku UMKM wajib mengerti tentang pengelolaan dan perencanaan keuangan sehingga kelak dapat bermanfaat dalam proses pengembangan usahanya, oleh karena itu literasi keuangan sudah menjadi hal mutlak yang harus dipahami oleh pelaku UMKM (Cahyono, 2012).

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada 2011 terdapat 52 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang 60% dari totalnya melibatkan pekerja perempuan. UMKM merupakan salah satu sektor yang sangat membantu dalam ketahanan perekonomian negara, hal ini dikarenakan UMKM mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Akan tetapi, literasi keuangan yang dimiliki pelaku UMKM khususnya wanita masih terbilang rendah. Hal ini perlu perhatian khusus agar para pelaku usaha perempuan dalam skala UMKM dapat juga meningkatkan kecerdasannya akan perencanaan keuangan dan dapat menikmati layanan jasa perbankan sesuai kebutuhan mereka. Layanan perbankan yang dapat membantu para pengusaha UMKM antara

lain: pemberian kredit untuk modal kerja dan juga layanan perbankan lainnya (Purnomo, 2011).

Laporan Bank Dunia 2012 menunjukkan bahwa kesetaraan gender penting dalam proses peningkatan literasi keuangan. Dampak pemberdayaan perempuan dalam ekonomi sangatlah penting bagi pertumbuhan ekonomi karena hal ini merupakan cara yang cerdas secara ekonomi. Jika perempuan dapat diberdayakan secara ekonomi, ini akan membantu pengentasan kemiskinan. Di Indonesia kontribusi perempuan sebagai pengusaha khususnya pengusaha UMKM sudah cukup lama berkembang, dimana dapat dilihat dari jumlah pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia pada tahun 2012 totalnya mencapai 60% dari total pengusaha UMKM, seperti dibuktikan pada data berikut:

Tabel 1.3

Data Pengusaha UMKM Perempuan Indonesia

Jumlah Pengusaha UMKM Perempuan di Indonesia	60% dari total pengusaha UMKM
Kategori Usaha	- 85% Usaha Mikro
	- 13% Usaha Menengah
	- 2% Usaha Besar

Sumber: IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), 2012

Dari Tabel 1.3 dapat dijelaskan bahwa jumlah pelaku UMKM Perempuan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat yang mana jumlahnya telah mencapai 60% dari jumlah UMKM secara keseluruhan. Dalam hal kategori usaha UMKM Perempuan terdiri dari 85% usaha mikro, 13% Usaha menengah, dan 2 % usaha besar.

Dengan melihat perkembangan UMKM Perempuan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari intervensi pemerintah untuk lebih melirik, membina serta mendukung para pengusaha perempuan terutama dalam skala UMKM agar eksistensinya tetap diakui dan lebih meningkat. Pengusaha perempuan di Indonesia perlu mendapat dukungan modal dari lembaga keuangan (perbankan) untuk dapat mengembangkan dan membantu kelancaran usahanya. Menurut *International Finance Corporation (IFC)*, hal ini sebagai potensi bagi lembaga keuangan (perbankan) dan menjadikannya target pemasaran produk pembiayaan. Berdasarkan data IFC, perempuan memiliki potensi untuk menghasilkan hubungan perbankan yang berkelanjutan dan menguntungkan. Hampir 90% pengusaha UMKM perempuan, modal usahanya berasal dari modal mereka sendiri. IFC mendorong perbankan untuk mengembangkan produk khusus bagi wirausaha perempuan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012).

Perhatian kepada pengusaha perempuan juga ditunjukkan dengan cara meningkatkan kualitas produk dan layanannya bagi nasabah dari kaum hawa ini (Kementerian Koperasi dan UKM, 2012). Perempuan merupakan pasar yang sangat potensial bagi bank komersial, mengingat masih banyak di antaranya yang belum terlayani oleh akses perbankan. Pihak perbankan dapat memperluas akses dan fasilitas bagi UMKM bagi para pengusaha perempuan dengan melakukan pemberian kredit untuk memperluas usaha.

Melihat hal ini maka peneliti merasa tertarik dan merujuk pada beberapa hasil studi empiris terdahulu untuk melakukan penelitian tentang determinan tingkat literasi keuangan pelaku UMKM perempuan, adapun UMKM perempuan yang akan dilakukan penelitian yaitu UMKM perempuan yang berada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

UMKM di Kalimantan Barat jika dilihat dari jumlahnya sudah berkembang dengan pesat yang mana terbukti bahwa pada tahun 2009 jumlah UMKM di Kalimantan Barat mencapai 61.793 unit, pada tahun 2010 mengalami kenaikan dan berjumlah 93.746 unit, selanjutnya pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 72.117 unit, kemudian pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan yaitu berjumlah 77.059 unit, selanjutnya pada tahun 2013 meningkat dengan jumlah 89.287 unit, selanjutnya pada tahun 2014 kembali meningkat dan berjumlah 107.515 unit, dan pada tahun 2015 berjumlah 108.006 unit. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data berikut :

Tabel 1.4**Data Perkembangan Jumlah UMKM di Kalimantan Barat**

NO	KABUPATEN /KOTA	TAHUN						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Kota Pontianak	5.625	5625	3.577	2240	4407	4407	5767
2	Kabupaten Mempawah	3762	4122	1997	1997	2094	4135	3135
3	Kota Singkawang	3529	4117	3689	3689	3695	3695	3701
4	Kabupaten Sambas	5905	6838	4242	7987	8038	8652	8743
5	Kabupaten Bengkayang	12563	7903	11653	12653	12653	12653	12871
6	Kabupaten Landak	2471	15900	15900	15900	25584	24984	25436
7	Kabupaten Sekadau	–	107	874	860	860	1993	1977
8	Kabupaten Sanggau	–	5545	5545	5545	5545	5873	6064
9	Kabupaten Sintang	16369	31305	16372	16372	16372	24277	24074
10	Kabupaten Melawi	854	854	–	891	1013	1583	1122
11	Kabupaten Kapuas Hulu	7469	7463	7710	7710	7710	13693	13034
12	Kabupaten Ketapang	962	1009	95	752	935	1015	896
13	Kabupaten Kubu Raya	982	1656	192	192	110	284	897
14	Kabupaten Kayong Utara	1302	1302	271	271	271	271	289
JUMLAH		61.793	93.746	72.117	77.059	89.287	10.7515	108.006

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Dari Tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa jumlah UMKM Di Kalimantan barat mengalami fluktuasi yang terus menerus. Kondisi tersebut juga dialami oleh UMKM di Kabupaten Mempawah yang mana dapat dilihat pada data berikut :

Tabel 1.5

**Data Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten Mempawah Tahun
2009-2015**

No	Kategori Usaha	TAHUN						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Usaha Mikro	761	1.547	1.479	1.479	1.539	2.664	1.664
2	Usaha Kecil	1.623	1.779	472	472	501	1.266	1.266
3	Usaha Menengah	1.378	796	46	46	54	205	205
Jumlah		3.762	4.122	1.997	1.997	2.094	4.135	3.135

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Dari Tabel 1.5 disebutkan bahwa pada tahun 2009 jumlah UMKM di Kabupaten Mempawah yaitu berjumlah 3.762 unit, pada tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 4.122 unit, selanjutnya pada tahun 2011 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu tersisa 1.997 unit, pada tahun 2012 jumlah UMKM tidak mengalami perubahan yaitu masih berjumlah 1.997 unit, selanjutnya pada tahun 2013 jumlah UMKM mengalami kenaikan yaitu berjumlah 2.094 unit, selanjutnya pada tahun 2014 jumlah UMKM kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu berjumlah 4.135 unit, dan pada tahun 2015 jumlah UMKM mengalami penurunan yaitu menjadi 3.135 unit.

Data diatas merupakan data jumlah UMKM secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Mempawah. Sedangkan untuk jumlah UMKM Perempuan sendiri di Kabupaten Mempawah jumlahnya dalam tiga tahun terakhir ini berkembang sangat pesat, dapat dibuktikan dengan data berikut:

Tabel 1.6

Data Jumlah Pelaku UMKM Perempuan Kabupaten Mempawah

NO	KATEGORI USAHA	TAHUN		
		2012	2013	2014
1	Usaha Mikro	887	923	998
2	Usaha Kecil	283	300	759
3	Usaha Menengah	27	32	133
Jumlah		1197	1255	1890

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Barat, 2015

Dari Tabel 1.6 disebutkan bahwa jumlah pelaku UMKM Perempuan pada tahun 2012 berjumlah 1.197 unit, selanjutnya pada tahun 2013 jumlah pelaku UMKM Perempuan mengalami peningkatan yaitu berjumlah 1.255 unit, dan pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan yaitu berjumlah 1.890 unit.

Berdasarkan data di atas jumlah pelaku UMKM Perempuan di Kabupaten Mempawah sudah berkembang dengan pesat. Namun hal ini tidak didukung dengan SDM para pelaku usaha tersebut. Kondisi UMKM di Kabupaten Mempawah saat ini masih memiliki keterbatasan dengan berbagai permasalahan, baik kelembagaan usaha, maupun permodalan, yang masih merupakan faktor pembatas ruang gerak UMKM. Namun bila dipelajari permasalahan yang ada, pada dasarnya secara umum terletak pada keterbatasan SDM dari pelaku UMKM itu sendiri. Keterbatasan yang dialami tersebut diantaranya dalam permodalan, pengelolaan keuangan perusahaan, kurang mantapnya pelaksanaan manajemen keuangan, terbatasnya akses informasi dan teknologi, serta sempitnya lingkup pasar.

Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haque dan Zulfiqar (2016), melakukan penelitian tentang literasi keuangan pada wanita dengan judul “*Women’s Economic Empowerment through Financial Literacy, Financial Attitude and Financial Wellbeing*”. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Wanita yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki usia yang sudah dewasa memiliki tingkat literasi keuangan yang baik. Tingginya tingkat literasi akan mempengaruhi kesejahteraan dan pemberdayaan wanita.

Penelitian selanjutnya yaitu yang dilakukan Fernandes, dkk. (2013), menyimpulkan bahwa usia, gender, pendapatan, tabungan dan diversifikasi resiko berpengaruh positif terhadap tingkat literasi seseorang. Almenberg and Dreber (2012), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat literasi wanita lebih rendah dibanding pria, wanita cenderung tidak berani dalam mengambil resiko dan lebih cenderung terjadi kesenjangan gender dalam partisipasi pasar saham. Lusardi (2008), menemukan bahwa pendidikan rendah dan perempuan memiliki tingkat literasi yang rendah sehingga kurang berpartisipasi dalam pasar saham dan kurang dalam perencanaan pensiun. Penelitian lainya, Amaliyah dan Witiastuty (2015), menunjukan bahwa tingkat literasi pelaku UMKM di Kota Tegal masuk dalam kategori tinggi. Gender dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat literasi UMKM di kota Tegal, dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM kota Tegal.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti serta merujuk pada beberapa hasil studi empiris terdahulu dengan mengingat masih terdapat permasalahan maupun kendala yang dialami oleh UMKM perempuan di Kabupaten Mempawah dalam hal SDM dalam mengelola keuangan penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan maupun pengetahuan para pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik :

“Determinan Tingkat Literasi Keuangan Pelaku UMKM Perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat”

B. Rumusan Masalah

Mengingat masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Perempuan di Kabupaten Mempawah terutama pada SDM dan pengelolaan keuangan maka akan dilakukan analisis mengenai determinan tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Dengan mengacu pada permasalahan yang di kemukakan diatas, maka muncul pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut: “Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM Perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh usia terhadap tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh usia usaha terhadap tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh jenis usaha terhadap tingkat Literasi Keuangan pada pelaku UMKM Perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

4. Untuk mengetahui pengaruh kategori usaha terhadap tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
5. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
6. Untuk mengetahui pengaruh akun rekening terhadap tingkat literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penelitian dan saran dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan dalam meningkatkan potensi maupun eksistensi para pelaku UMKM khususnya pelaku usaha perempuan.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bagi masyarakat khususnya para pelaku UMKM perempuan dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan pemahaman akan literasi keuangan atau melek finansial.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau pembanding untuk penelitian berikutnya.